

# KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

24 Desember 2021

## Destinasi Super Prioritas Nasional, Loteng Belum Miliki Ripparda dan Dukungan Kebijakan untuk Mandalika

24 Desember 2021



Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima hasil pemeriksaan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja tahun 2020 dan Semester I 2021 dan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Adelwan Ruswana bersama Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Kamis, 23 Desember 2021. (Suara NTB/nas)

**Mataram (Suara NTB)** – Pemerintah Pusat telah menetapkan Kawasan Mandalika, Kuta Lombok Tengah menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia. Namun kebijakan nasional ini belum didukung dalam bentuk regulasi oleh Pemda Lombok Tengah (Loteng).

Bahkan yang membuat cukup miris, Loteng belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparda). Begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Loteng, tidak ada yang menyebutkan terkait dengan dukungan pengembangan Mandalika.

“Saya baru tahu Lombok Tengah belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dan dalam RPJMD pun tidak ada terkait dengan Mandalika,” ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, AdeIwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA., Kamis, 23 Desember 2021.

Hal tersebut dikatakan Ruswana usai penyerahan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Lombok Tengah dalam Mendukung Mandalika sebagai Destinasi Super Prioritas Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya, di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Kamis, 23 Desember 2021. Pada kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Loteng tidak hadir tetapi diwakili oleh Sekda.

Ruswana mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum optimal dalam pengembangan maupun pemasaran pariwisata Lombok Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan signifikan yang terjadi pada aspek regulasi, kelembagaan dan kesiapan pengembangan dan pemasaran pariwisata.

“Saya juga tidak melihat inovasi terkait dengan perizinan. Mudah-mudahan ini segera dimasukkan karena sekarang ada revisi RPJMD,” ujarnya.

Ruswana menjelaskan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB sudah memiliki Ripparda. Tetapi Loteng yang menjadi Destinasi Super Prioritas Nasional di Mandalika belum memiliki Ripparda. Untuk itu, pihaknya meminta agar hal ini diseriusi. “Regulasi terkait dengan dukungan pengembangan pariwisata di Lombok Tengah perlu diseriusi. Agar masyarakat mendapat manfaatnya,” tandasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., yang hadir pada penyerahan hasil pemeriksaan kinerja Pemda itu berharap apa yang menjadi rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Menurut Gubernur, rekomendasi BPK terkait dengan pariwisata di Loteng merupakan masukan yang konstruktif untuk pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Selain itu, BPK juga menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja tahun 2020 dan Semester I 2021 pada Pemprov NTB dan Instansi Terkait Lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov NTB belum optimal dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan signifikan yang terjadi pada aspek upaya fasilitasi pemerintah daerah dan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian BPK juga menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya. BPK menyimpulkan bahwa efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram dipengaruhi oleh permasalahan signifikan yang perlu untuk segera diperbaiki.

Serta penyerahan hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun 2020 Dan 2021 sampai triwulan III pada Pemerintah Kota Mataram. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Namun demikian BPK menemukan permasalahan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. **(nas)**